

PELATIHAN KERJA MINIM TANTANGAN SERIUS INDONESIA

Program Manajer Internasional NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Siti Khoirun Ni'mah mengatakan pelatihan kerja yang minim bagi pekerja dan angkatan kerja merupakan tantangan serius bagi masa depan Indonesia.



ILUSTRASI

Jakarta, HanTer - "Pemerintah pusat dan daerah harus memecahkan permasalahan ini. Kebijakan pemerintah terhadap Revolusi Industri keempat harus berorientasi pada pekerja dan angkatan kerja," kata Ni'mah di Jakarta, seperti dilansir Antara, Senin (14/5/2018).

Ni'mah mengatakan pemerintah juga harus memastikan pekerja yang berada pada struktur produksi menjadi prioritas kebijakan agar tidak kehilangan pekerja.

Menurut Ni'mah, pekerja dan angkatan kerja yang memiliki keahlian

dan keterampilan memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, sekaligus meningkatkan posisi tawarnya. Namun, kesempatan pekerja dalam mendapatkan pelatihan-pelatihan kerja atau vokasi ternyata masih sangat rendah.

Untuk itu, ia mengimbau pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah agar dapat menambah jumlah Balai-balai latihan kerja di berbagai daerah di Indonesia. Keberadaan pelatihan kerja

yang memberikan jenis keahlian dan keterampilan seiring dengan perkembangan industri pun harus merata di berbagai daerah. Dengan demikian, Balai-balai latihan kerja tersebut dapat diakses pekerja dengan mudah.

Selain itu, Pemerintah perlu menambahkan anggaran pelatihan kerja di dalam Anggaran dan Belanja Pemerintah Nasional dan Daerah (APBN/APBD). Saat ini alokasi anggaran di bidang kebagian kerja masih sangat rendah. Jauh dibandingkan

dengan negara-negara lain, termasuk negara-negara di ASEAN seperti Malaysia dan Singapura.

"Alokasi anggaran oleh pmda (provinsi, kabupaten dan kota) untuk pelatihan kerja, bimbingan kerja dan pemagangan juga sangat minimal," kata Ni'mah.

Menurut Survei Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata hanya enam persen pekerja di tingkat nasional yang pernah mengikuti pelatihan-pela-

atihan kerja atau vokasi pada rentang 2008 hingga 2015.

Mengutip data Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker), tercatat dari total 128 juta angkatan kerja, terdapat 7,04 juta orang pengangguran terbuka. Jumlah ini berpotensi meningkat, mengingat Indonesia dihadapkan pada revolusi Industri 4.0 yang diprediksi akan menggerus sejumlah pekerjaan dan mengeliminasi angkatan kerja dengan kualifikasi rendah.

■ Arbi

Menristek Klaim Tak Ada Lagi Dikotomi PTN-PTS



MOHAMAD NASIR

Jakarta, HanTer - Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir, mendorong Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Tanah Air untuk meningkatkan kualitas.

"Sekarang tidak ada lagi dikotomi antara PTS dan Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Oleh karena itu, kami mendorong PTS untuk meningkatkan kualitasnya, sehingga tugas meningkatkan kualitas pendidikan tidak hanya tugas PTN saja," ujar Menristekdikti, Senin (14/5/2018).

Tidak ada pemisahan antara PTS maupun PTN, lanjut dia, terletak pada penganggurannya saja. Sementara pada hal lain tidak ada perbedaannya termasuk dalam pemberian beasiswa pada dosen dan mahasiswa. "Kami dari kementerian menjaga betul agar PTS dapat meningkatkan kualitasnya," ujarnya.

Nasir menjelaskan bantuan yang diberikan pada PTS berupa beasiswa dosen untuk

studi lanjut, beasiswa Bidikmisi dan beasiswa Program Prestasi Akademik (PPA). Pada 2018, pihak Kemristekdikti menyediakan pihaknya menyediakan sebanyak 220.000 beasiswa pada 2018 yang terdiri dari 90.000 beasiswa Bidikmisi dan 130.000 beasiswa PPA.

Ia menambahkan beasiswa untuk mahasiswa berprestasi namun berasal dari keluarga tidak mampu atau Bidikmisi pada 2017 kuotanya sebanyak 80.000 beasiswa dan pada 2019, pihaknya mengajukan sebanyak 130.000 beasiswa. Sedangkan untuk PPA, jumlah kuota pada tahun ini sebanyak 130.000 beasiswa dan hampir separuhnya diberikan kepada mahasiswa yang ada di PTS.

"Dari 130.000 tersebut, sekitar 60.000 disebarkan ke PTS, termasuk PTS yang ada di wilayah Lampung. Jadi beasiswa itu tidak hanya untuk mahasiswa yang berasal dari PTN saja," terang Nasir.

■ Ant

Menaker Imbau THR Dicairkan Paling Lambat H-7 Lebaran



ILUSTRASI

Jakarta, HanTer - Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri meminta perusahaan untuk membayar tunjangan hari raya (THR) paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri.

Pemintaan tersebut sesuai dengan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2018 yang ditandatangani pada 8 Mei 2018 dan ditujukan kepada para gubernur, dan para bupati/wali kota se-Indonesia.

"THR Kegamaan wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya

keagamaan. Pekerja yang telah bekerja selama sebulan secara terus menerus juga berhak mendapatkan THR," kata Hanif dalam keterangan tertulisnya, Senin (14/5/2018).

Dia mengatakan pekerja yang sudah bekerja minimal sebulan juga berhak mendapatkan THR.

Besaran THR bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, memperoleh THR satu bulan upah.

Bagi pekerja yang mempunyai masa kerja satu bulan secara terus-menerus

terjadi kurang dari 12 bulan, THR-nya diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan yang sudah ditetapkan, yaitu masa kerja dibagi 12 bulan dikali satu bulan upah.

"Pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan pengusaha kepada pekerja. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016," ujar Menaker Hanif.

Sementara itu, bagi pekerja harian lepas yang mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, besaran THR-nya berdasarkan upah

satu bulan yang dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.

Bagi pekerja lepas yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 (dua belas) bulan, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.

"Bagi perusahaan yang menetapkan besaran nilai THR dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan lebih besar dari nilai THR yang telah ditetapkan, THR Kegamaan yang dibayarkan kepada pekerja sesuai dengan yang tertera di perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan yang telah dilakukan," kata Hanif.

Dia mengatakan jika mengacu pada regulasi, pembayaran THR dilakukan paling lambat H-7. Tetapi di samping itu, bisa pembayaran dilakukan maksimal dua minggu sebelum Lebaran. Hal ini dilakukan agar pekerja dapat mempersiapkan mudik dengan baik.

■ Arbi

Yawatim Dirikan Kampus Khusus Anak Yatim

Jakarta, HanTer - Yayasan Wakaf Yatim dan Fakir Miskin (Yawatim) ASEAN akan mendirikan Universitas Yatim ASEAN yang berlokasi di Pekanbaru, Riau. Pembangunan dimulai tahun ini, dan ditargetkan rampung dua tahun mendatang.

"Pendirian Universitas anak yatim ASEAN merupakan langkah maju, jadi kepada anak-anak marilah kita sama-sama doakan agar yang kita perlukan di restui Allah SAW," kata Ketua Forum Yatim ASEAN, Tengku Mahmud Bin Mansor di Jakarta, kemarin.

Dia menjelaskan, universitas tersebut sama seperti kampus untuk anak yatim dari Forum Yatim ASEAN yang sudah dibangun di Malaysia sejak 22 tahun lalu dan kini telah melahirkan sekitar 7.000 lebih sarjana.

"Kami sadar, anak yatim mengalami kesulitan dana untuk menempuh pendidikan yang lebih baik. Makanya, kami berencana kembali mendirikan kampus untuk anak yatim dan kurang mampu. Karena pendidikan adalah hal terbaik yang harus dilakukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan derajat anak yatim serta anak miskin. Sehingga mereka bisa mendapatkan



ISTIMEWA

bekal untuk menyongsong masa depan," ungkapnya.

Kampus itu nantinya akan menerima 1.000 mahasiswa dengan tahap awal mencakup tiga Fakultas, yakni Pariwisata dan Manajemen Bisnis. Kampus itu juga akan memiliki ruang kuliah yang representatif, kurikulum yang modern hingga laboratorium tempat anak-anak magang kerja serta dosen pengajar yang berkualitas termasuk asrama bagi mahasiswa.

"Karena universitas ini kami siapkan khusus untuk memberikan akses lebih baik bagi pendidikan anak-anak yatim dari berbagai wilayah di Indonesia dan negara-negara lainnya. Apalagi kampus juga dilengkapi dengan asrama yang bisa menampung sebanyak 3.000 mahasiswa. Dimana, 90 persen mahasiswa dari

Indonesia dan sisanya 10 persen lagi mahasiswa dari negara Asean," paparnya.

Menurutnya, saat ini pihaknya sudah meneyelesaikan proses pembangunan kampus itu. Saat ini lahan seluas 130 ha itu, setengahnya sedang pengerjaan pembersihan lahan dan tahap peningkahan surat tanahnya menjadi sertifikat hak milik (SHM). Diharapkan sekitar bulan Juli-Agustus 2018, peletakan batu pertama pembangunan kampus Universitas Yatim ASEAN sudah bisa dilakukan.

"Kampus di Pekanbaru ini merupakan cabang langsung dari kampus yang ada di Terengganu, Malaysia. Sehingga tahun ajaran baru nanti sudah bisa menerima mahasiswa baru, terkhusus anak yatim Indonesia di kampus ini," terangnya.

■ Arbi

MITRA INTERNATIONAL RESOURCES

PEMBERITAHUAN
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MITRA INTERNATIONAL RESOURCES Tbk ("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT Mitra International Resources Tbk ("Perseroan") telah dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 11 Mei 2018 bertempat di Ghrha MITRA, Jl. Pejaten Barat No.6, Jakarta Selatan, dan telah diambil keputusan-keputusan sebagai berikut:

- Pada Agenda Pertama dari Rapat:**
Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat:
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2017 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017 yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Herman Dody Tanumihardja & Rekan, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, sebagaimana dinyatakan dalam laporannya No.007/GA/HDT-DT/MIR/III/2018 tanggal 23 Maret 2018, dengan demikian membeikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017.
- Pada Agenda Kedua dari Rapat:**
Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat:
Menyetujui tidak menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2017.
- Pada Agenda Ketiga dari Rapat:**
Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat:
Menyetujui pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyusun Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018, serta menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pada Agenda Keempat dari Rapat:**
Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat:
Menyetujui pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2018.

Jakarta, 15 Mei 2018
PT Mitra International Resources Tbk
Direksi Perseroan

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan penantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi melalui Jasa Pra Lelang PT. Griya Larista-Balai Lelang telis 021-53663642.

1. **CV ALAM KARYA**
Sewa lahan yang terdiri dari 2 (dua) bidang tanah dan bangunan
Seluas 1530 m² sesuai SHM No. 00626/Tanjungbaru
Seluas 2999 m² sesuai SHM No. 00277/Tanjungbaru
Kedua tanah atas nama HAN BUN terletak di RT.04/02 T.J. BARU (Setempat dikenal dengan Jl. Raya Rengas Bandung/Bekasi-Karawang RT.004 RW.002 No. 74), Desa/Kelurahan Tanjungbaru, Kecamatan Lemahabang (Sebagian Kecamatan Cikarang Timur), Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat
(Limit Rp. 5.350.000.000,- ; Jaminan Rp. 1.605.000.000,-)

2. **ARYA WIJAYA**
Sesibidng tanah seluas 361 m² berikuk bangunan diatasnya sesuai SHM No. 00741/Sukasahi atas nama ARYA WIJAYA Bin RIBAN terletak di RT.10/RW.04 (Setempat dikenal dengan Kp. Penyambalan RT.010 RW.004), Desa/Kelurahan Sukasahi, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat
(Limit Rp. 65.000.000,- ; Jaminan Rp. 19.500.000,-)

Keterangan:
• Uang jaminan lelang agar disetorkan melalui Virtual Account PT. BNI (Persero) Cabang Bekasi yang diperoleh dari Aplikasi e-Auction.
• Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambalambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
• Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme penawaran menjadi beban peserta lelang.
• Obyek dilelang pada kondisi apa adanya (as is) calon peserta dibebaskan telah melihat dan mengetahui obyek yang akan ditawarkan, berikuk semua perkara yang ada bila terjadi gugatan dari pihak lain/berikuk terkait lelang, pemenang lelang tidak akan melakukan gugatan kepada KPKNL Bekasi, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan PT. Griya Larista-Balai Lelang, termasuk juga bila terjadi pembatalan/penundaan lelang.

Amatizing: Calon Peserta lelang dapat melihat obyek yang akan dilelang sejak Pengumuman ini diterbitkan. Informasi dapat menghubungi PT. Griya Larista-Balai Lelang telis 021-53663642.

Persyaratan Lelang:
• Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website www.lelang.kemendagri.go.id
• Syarat dan ketentuan serta tatacara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas.

Pelaksanaan Lelang:
[Cara Penawaran : Closed Bidding (dengan mengakses url www.lelang.kemendagri.go.id)
Hari : Rabu
Tanggal : 30 Mei 2018
Batas Akhir Penawaran : 11.30 Waktu Server (WIB)
Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bekasi Jl. Seran Anom No. 8 D, Bekasi.
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran
Pelunasan Harga : 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
Lelang :
Sisa Lelang Pembeli : 2% (dua persen) dari harga lelang

Jakarta, 15 Mei 2018
Peroleh
TTD
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk

PENGUMUMAN STUDI AMDAL
RENCANA PEMBANGUNAN
KANTOR BESERTA FASILITASNYA

Rencana kegiatan pembangunan Kantor beserta Fasilitasnya oleh PT. Adhi Karya (Persero), Tbk di Jl. M.T. Haryono, Kav. 27, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan akan ruang kantor dan tempat usaha di lokasi yang strategis.

Rencana Pembangunan Kantor beserta Fasilitasnya ini berada pada lahan perencanaan ± 3.989 m² dari total lahan seluas ± 4.077 m² berupa 1 (satu) Tower Kantor 13 lantai dan 4 basement yang digunakan untuk Kantor di Lt. 1 - Lt. 13, dan Tempat Parkir di Lt. Basement 1-4 dengan kapasitas total 181 mobil serta total luas seluruh lantai bangunan ± 14.171,60 m². Rencana kegiatan pembangunan gedung ini dilaksanakan selama ± 21 bulan.

Dalam rangka menerapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012 tentang keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL maka melalui pengumuman oleh PT. Adhi Karya (Persero), Tbk selaku pelaksana kegiatan mengharapakan saran, pendapat dan tanggapan masyarakat serta bahan kajian dan telaahan dalam studi AMDAL selanjutnya.

Saran dan tanggapan disampaikan kepada instansi yang bertanggung jawab (DINAS LINGKUNGAN HIDUP Prov. DKI Jakarta) serta tembusannya kepada Pemrakarsa kegiatan dalam batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pengumuman ini dikeluarkan.

Nama dan Alamat instansi yang bertanggung jawab:
DINAS LINGKUNGAN HIDUP Prov. DKI Jakarta Cq. Sekretariat Komisi Amdal
Prov. DKI Jakarta
Jl. Mandala V No. 67, Cilandak, Jakarta Timur
Telp: 021-8092744 / Faks: (021) 8091056

Nama dan Alamat Pemrakarsa
PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
Alamat: Jl. Pengantian Ali No. 88, Ciracas, Jakarta Timur
Telp: (021) 228 229 80

Jakarta, Mei 2018
DINAS LINGKUNGAN HIDUP Prov. DKI Jakarta
PT. Adhi Karya (Persero), Tbk